


Emergency Education Principles Child Friendly Based in Sister Village System Implementation (Mitigation of Mount Merapi Eruption Disaster)

Aulia Puspita Saputri, Kanthi Pamungkas Sari✉

Department of Islamic Primary Education, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

✉ kpamungkassari@ummgl.ac.id

 <https://doi.org/10.53017/ujsah.158>

Received: 17/02/2022

Revised: 25/03/2022

Accepted: 27/03/2022

Abstract

Emergency education is held when a disaster occurs and is intended for children affected by the disaster. The implementation should be child-friendly so that the child's psychological condition is not disturbed or depressed. But in reality, many are held spontaneously and are influenced by external factors. This study aims to examine the principles of emergency education that is implemented on a child-friendly basis in the implementation of the sister village system (Mitigation of the Mount Merapi eruption disaster). The research method used is qualitative, with data collection techniques using FGD, interviews and observations. The research subjects were 15 volunteers from the Merapi Emergency School volunteers, Al Qur'an Education Park, the Krinjing Village Disaster Risk Reduction Organization and the Village Disaster Management Institute. Meanwhile, the informants were children who were affected by the eruption of Mount Merapi from Krinjing Village, Dukun District, who lived in the Deyangan Village Refugee Command Post and the Deyangan Village Refugee Post Coordinator. The object of the research is the implementation of all the principles of emergency education for children living in the Deyangan Village Refugee Post in the implementation of the sister village system. Data analysis techniques with data collection, data presentation, data reduction, verification / drawing conclusions. The results showed that the emergency education held had implemented child-friendly principles, namely non-discrimination, activities oriented towards fulfilling the best interests of children, creating an environment that respects children's dignity and ensures holistic and integrated development, respect for children's views, good education management.

Keywords: Principle; Emergency Education; Child Friendly; Sister Village

Prinsip-Prinsip Pendidikan Darurat Berbasis Ramah Anak dalam Implementasi Sistem *Sister Village* (Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi)

Abstrak

Pendidikan darurat diselenggarakan ketika terjadi bencana dan diperuntukan anak-anak yang terdampak bencana. Pelaksananya seharusnya berbasis ramah anak agar kondisi psikologis anak tidak terganggu atau merasa tertekan. Namun dalam realitanya banyak yang diselenggarakan secara spontan dan dipengaruhi factor-faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip pendidikan darurat yang dilaksanakan dengan berbasis ramah anak dalam implementasi sistem sister village (mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengambilan data menggunakan FGD, wawancara dan observasi. Subyek penelitian adalah 15 relawan yang berasal dari relawan Sekolah Darurat Merapi, Taman Pendidikan Al Qur'an, Organisasi Pengurangan Risiko Bencana Desa Krinjing dan Lembaga Penanggulangan Bencana Desa. Sedangkan informannya adalah anak-anak yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi dari Desa Krinjing Kecamatan Dukun yang tinggal di Posko Pengungsian Desa Deyangan dan Koordinator Posko Pengungsian Desa Deyangan. Obyek dari penelitian yang dilakukan adalah pelaksanaan semua prinsip-prinsip pendidikan darurat untuk anak-anak

yang tinggal di Posko Pengungsian Desa Deyangan dalam implementasi sistem *sister village*. Teknik analisis data dengan dengan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, verifikasi/ penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa pendidikan darurat yang diselenggarakan telah melaksanakan prinsip-prinsip ramah anak yaitu nondiskriminasi, kegiatan berorientasikan pada pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistic dan terintegrasi, penghormatan terhadap pandangan anak, pengelolaan pendidikan yang baik

Kata kunci: Prinsip; Pendidikan Darurat; Ramah Anak; *Sister Village*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki Indeks Risiko Bencana (IRB) tinggi. Dari, 34 propinsi di wilayah Indonesia, 21 propinsi memiliki IRB kategori tinggi dan 13 propinsi kategori sedang [1]. Bencana alam dapat terjadi kapan saja, dimana saja, menimpa siapa saja tanpa pandang bulu. Pada setiap kejadian bencana alam, anak merupakan kelompok rentan menjadi korban yang terdampak baik fisik maupun psikhis. Mereka masih memiliki pengetahuan yang terbatas tentang kebencanaan dan juga fisik yang belum cukup tangguh, sehingga anak-anak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa. Sebagai konsekuensinya pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi secara tepat dan sungguh-sungguh agar dapat meminimalkan dampak risiko bencana pada anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor: 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan menderit sakit tertentu. Dikuatkan dengan Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2014 Pasal 59 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan anak secara khusus, termasuk anak korban bencana. Perlindungan yang dimaksud salah satunya memberikan kemudahan mendapatkan akses pendidikan yang dibutuhkan sesuai kondisi obyektif anak termasuk dalam pendampingan belajar. Namun demikian belum semua daerah menurunkan undang-undang tersebut menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota. Sehingga pelaksanaannya memberikan peluang terjadinya subyektifitas dalam penafsiran.

Pendidikan darurat diselenggarakan ketika terjadi bencana dan diperuntukan anak-anak yang terdampak bencana. Keputusan untuk menyelenggarakan pendidikan darurat didasarkan pada penetapan status keadaan darurat bencana oleh pimpinan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berwenang [2]. Jangka waktu penyelenggaraan pendidikan bersifat sementara, selama anak berada di pengungsian. Pendidikan darurat untuk anak-anak lazimnya juga harus ramah anak, karena akan memberikan rasa aman nyaman pada anak, jauh dari kekerasan dan eksploitasi serta melindungi anak dari perilaku yang salah. Akan tetapi kendala yang sering terjadi adalah penyelenggaraannya perlu lebih mempertimbangkan prinsip-prinsip pendidikan ramah anak secara optimal. Perencanaan kegiatan pendidikan darurat seharusnya disusun sesuai dengan kondisi kedaruratan dan karakteristik dampak yang ditimbulkan dari peristiwa bencana. Namun banyak kegiatannya yang lebih bersifat spontan [3]

Di Kabupaten Magelang memiliki program mitigasi bencana erupsi gunung berapi yang unik sesuai dengan budaya yang ada yaitu sistem *sister village* atau desa bersaudara. Sistem *sister village* antara desa yang ada di kawasan rawan bencana kategori III (KRB III) dengan Desa Penyangga yang ada di daerah yang lebih aman [4], [5]. Implementasi sistem *sister village* meliputi segala aspek mitigasi bencana yang direncanakan dan disepakati bersama antara kedua belah pihak melalui rencana kontijensi. Termasuk aspek kegiatan pendidikan darurat anak-anak di pengungsian. Layanan khusus diberikan kepada semua anak tanpa terkecuali untuk mendapatkan hak pendidikan anak dilakukan berdasarkan data-data obyektif anak, terencana dan sistemik [6].

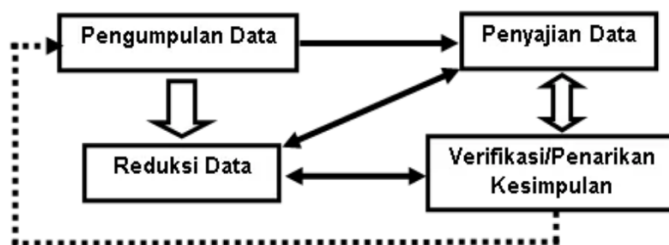
Mitigasi bencana meliputi kegiatan prabencana, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan pascabencana [7], [8]. Pendidikan darurat merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara khusus bertujuan untuk memenuhi hak anak yang terdampak bencana [9], [10]. Pendidikan darurat harus ramah anak agar kondisi psikologis anak tidak terganggu atau merasa tertekan [2]. Pendidikan darurat dalam mitigasi bencana diselenggarakan dengan pendekatan struktural dan kultural [11], [12]. Akan tetapi implementasi prinsip-prinsip ramah anak dalam pendidikan darurat sering mengalami kendala karena factor eksternal karena dipengaruhi aspek sumber daya yang terlibat (pedagogi), ekonomi, social dan politik [13], [14].

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip pendidikan darurat yang dilaksanakan dengan berbasis ramah anak dalam implementasi sistem *sister village* (mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi).

2. Metode

Desain penelitian adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Subyek penelitian ini adalah 15 relawan dari Sekolah Darurat Merapi (SDM), relawan dari Taman Pendidikan Al Quran (TPA) dan relawan dari Organisasi Pengurangan Risiko Bencana (OPRB) Desa Krinjing dan Lembaga Penanggulangan Bencana Desa (LPBDesa) Deyangan. Relawan yang digunakan sebagai subyek penelitian adalah relawan yang aktif dan resmi bertugas bidang pendidikan resmi di posko pengungsian. Sedangkan informannya terdiri dari anak-anak yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi dari Desa Krinjing Kecamatan Dukun yang tinggal di Posko Pengungsian Desa Deyangan dan Koordinator Posko Pengungsian Desa Deyangan. Obyek dari penelitian yang dilakukan adalah pelaksanaan semua prinsip-prinsip pendidikan darurat untuk anak-anak yang tinggal di Posko Pengungsian Desa Deyangan dalam implementasi sistem *sister village*

FGD dilakukan bersama relawan dari SDM, TPA, OPRB Desa Krinjing dan LPBDes Deyangan dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan prinsip-prinsip pendidikan darurat berbasis ramah anak di pengungsian. Wawancara dilakukan dengan anak-anak di pengungsian dan Koordinator Posko Pengungsian Desa Deyangan, untuk memperoleh data kegiatan-kegiatan pendidikan/ sekolah yang diikuti selama di pengungsian. Observasi dan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang dikumpulkan melalui FGD dan wawancara. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model Miles and Hubberman [15]. **Gambar 1** di bawah ini menjelaskan alur teknik analisis data yang dilakukan.



Gambar 1. Teknik analisis data penelitian

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Rencana Kontijensi Bidang Pendidikan dalam Sistem Sister Village

Sistem *sister village* mulai dikembangkan pada tahun 2011. Latar belakang pengalaman permasalahan-permasalahan yang terjadi pada proses evakuasi pengungsi

akibat terdampak erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010, menyebabkan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Magelang berupaya untuk meminimalisir permasalahan yang muncul serta membangun sistem yang lebih baik [4], [5].

Sistem *sister village* merupakan sistem persaudaraan antara dua desa ataupun lebih, antara desa yang mempunyai ancaman tingkat tinggi bencana Gunung Merapi atau lazim dengan sebutan kawasan rawan bencana III (KRB III) dengan desa yang dinilai aman dari ancaman erupsi Gunung Merapi (Penyangga). Desa KRB III adalah desa yang paling sering dilewati awan panas, lontaran bom vulkanik, gas beracun, aliran lava maupun guguran batu pijar jika terjadi erupsi [16]. Masyarakat dapat tetap merasa tenang meski hidup berdampingan dengan ancaman bencana karena implementasi *sister village* akan memberikan kepastian tempat tujuan pengungsian; mengurangi kepanikan dan kesemrawutan proses pengungsian; memudahkan pelayanan pengungsi dengan landasan persaudaraan. Ada perencanaan, pendataan, kesepakatan pengorganisasian dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan [4].

Perencanaan yang memberikan arah dalam pelaksanaan mitigasi bencana yaitu penyusunan rencana kontijensi oleh Pemerintah Desa KRB III dengan Desa Penyangga. Pokok-pokok rencana kontijensi tersebut meliputi: a) Sektor Manajemen dan Koordinasi (posko), b) Sektor Evakuasi dan Transportasi, c) Sektor Barak, d) Sektor Logistik, e) Sektor Dapur Umum, f) Sektor Kesehatan, g) Sektor Informasi dan Komunikasi, h) Sektor Keamanan, i) Sektor Pendidikan, j) Sektor Ekonomi.

Rencana kontijensi dalam sistem *sister village* tersebut pertama kali disusun pada tahun 2017, dan diperbaharui pada tahun 2019. Pembaharuan tersebut dilakukan antara Pemerintah Desa Krinjing dan Pemerintah Desa Deyangan dengan disahkan oleh BPBD Kabupaten Magelang. Tujuan dari pembaharuan tersebut adalah adanya perubahan-perubahan kondisi masyarakat Desa Krinjing, yang perlu diketahui oleh Desa Deyangan sebagai Desa Penyangga apabila terjadi pengungsian akibat bencana erupsi Gunung Merapi. **Tabel 1** menunjukkan pembaharuan di Sektor Pendidikan.

3.2. Kegiatan Pendidikan Darurat

UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 31 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara, termasuk anak-anak baik yang berada pada kondisi khusus maupun yang memiliki keterbatasan, semuanya berhak mendapatkan pendidikan [17]. Oleh karena itu meskipun dalam kondisi darurat sebagai dampak terjadinya bencana alam maka anak-anak yang berada di pengungsian tetap berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kondisi obyektif mereka.

Dalam kondisi darurat, penyelenggaraan pendidikan harus disesuaikan dengan berbagai aspek sehingga benar-benar mampu memberikan dampak positif pada anak. Diantaranya, mengurangi perasaan tertekan atau trauma pada anak, anak memiliki resiliensi yang relative baik meskipun terdampak bencana alam, tetap merasakan bahwa dalam situasi apapun mereka masih memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses pendidikan. Memang tidak mudah, namun hal tersebut akan dapat diselenggarakan dengan maksimal manakala ada perencanaan yang baik. Dengan kata lain bukan hanya sekedar menyelenggarakan pendidikan darurat saja guna pemenuhan hak anak, namun ada perencanaan dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sebelum bencana itu terjadi akan memberikan hasil yang baik.

Tabel 1. Pembaharuan Sektor Pendidikan

| Kegiatan | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menyiapkan kebutuhan guru, relawan, lokasi, peralatan KBM selama di pengungsian | <ul style="list-style-type: none"> • Menunjuk guru-guru dari Desa KRB III yang ikut dalam pengungsian untuk ikut mengajar • Menunjuk beberapa guru dari Desa Penyangga untuk ikut mengajar • Melibatkan Relawan Pendidikan dari SDM, jumlah personil menyesuaikan jumlah pengungsi anak • Melibatkan Relawan dari TPA, jumlah personil menyesuaikan jumlah pengungsi anak • Keterlibatan Relawan lain harus kompeten dan terkoordinir melalui Posko Pengungsian • Lokasi yang digunakan kegiatan pendidikan di lingkungan Posko: PAUD/TK Pertiwi, Masjid, Balai Desa, jika perlu penambahan maka akan diskusikan lebih lanjut • Peralatan KBM diperoleh dari Disdikpora Kabupaten Magelang dan bantuan dari donatur lainnya |
| Melaksanakan kegiatan KBM siswa PAUD, SD/MI, SMP, SMA/SMK/MA selama di pengungsian | <ul style="list-style-type: none"> • PAUD untuk anak usia 3-6 th • SD/MI untuk anak usia 7- 12 th • SMP/MTs untuk anak usia 13-15 th • SMA/SMK/MA untuk anak usia 16 – 18 th • Pelaksanaannya dikoordinir oleh Posko, dimonitoring dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang |
| Melaksanakan pembinaan mental spiritualitas anak-anak yang pengungsi | TPA melakukan pembelajaran: ketauhidan, Al Qur'an, hadis dan doa sehari-hari, tadabur alam dan outbond |
| Memfasilitasi terlaksananya kegiatan olah raga dan permainan anak-anak di lokasi pengungsian | OPRB atau LPBDes menyelenggarakan kegiatan: olahraga, kegiatan yang berorientasikan kemandirian, kebersihan lingkungan, berdamai dengan diri sendiri dan berbagai permainan tradisional |
| Melaporkan setiap perkembangan sector ke posko kabupaten | Ketua Divisi Rehabilitasi menyampaikan laporan kepada koordinator Posko Pengungsian dan selanjutnya diteruskan kepada Posko Kabupaten Magelang |

Sumber data: dokumen Rekontinjensi Erupsi Gunung Merapi dalam Pelaksanaan sister village Desa Krinjing dan Deyangan tahun 2019, wawancara koordinator Posko Pengungsian

Tujuan penyelenggaraan pendidikan darurat bagi anak-anak terdampak bencana adalah: a) Memberikan kesempatan untuk mendapatkan hak pendidikan. b) Memberikan layanan pendidikan sesegera mungkin setelah terjadinya bencana. c) Memenuhi kebutuhan akan lingkungan belajar yang aman. d) Meringankan dampak psikologis akibat bencana dan membangun harapan anak untuk masa depannya. e) Menyampaikan pesan-pesan penting tentang kondisi darurat akibat bencana [2].

Implementasi *sister village*, memberikan ruang yang luas bagi kedua belah pihak untuk melakukan perencanaan pendidikan bersama [4], [18]. Berdasarkan rekontinjensi pelaksanaan pendidikan darurat dilaksanakan sepekan setelah proses pengungsian, namun karena sedang dalam kondisi pandemic covid 19, maka dengan berbagai pertimbangan Pendidikan Darurat Merapi dimulai pada tanggal 16 November 2020. Pendidikan dilaksanakan setelah 10 hari pengungsi datang. Kegiatan pembelajarannya ada di lingkungan Posko Pengungsian, PAUD/TK Pertiwi Desa Deyangan, Masjid dan Balai Desa Deyangan. Hal tersebut memudahkan untuk memobilisasi anak-anak ke lokasi pembelajaran mereka. Pada awalnya anak-anak butuh waktu yang cukup lama untuk beradaptasi. Untuk anak-anak tingkat PAUD, TK dan sebagian SD mereka datang ke pengungsian sebagai bagian dari kelompok rentan, bersama salah satu dari orangtuanya. Rata-rata mereka didampingi oleh ibunya. Sedangkan yang tingkat SMP dan SMA mereka datang karena diminta oleh keluarganya untuk mendampingi orangtua yang rentan atau nenek/kakeknya yang rentan pula. Dengan berbagai pertimbangan terkait adaptasi dengan

lingkungan baru dan keterbatasan yang ada serta belum kondusif maka perlu strategi khusus untuk pembelajaran [19].

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Krinjing dan Desa Deyangan, penyelenggaraan Pendidikan Darurat berbasis ramah anak. Meskipun tidak ada kebijakan khusus terkait dengan implementasi pendidikan ramah anak, namun pada intinya anak perlu diberikan hak-haknya secara penuh. Anak-anak mengalami kondisi mental yang berubah akibat mengalami bencana yang sama sekali tidak diharapkan, kemudian harus beradaptasi dengan fasilitas lingkungan yang baru pula. Oleh karena itu proses pembelajaran dalam pendidikan darurat harus mempertimbangkan karakteristik psikologisnya. Karakter psikologis anak yang masih senang bermain, ingin diperhatikan, dan rasa ingin tahu yang tinggi [20]. Pada **Tabel 2** berikut disampaikan implementasi prinsip-prinsip pengembangan ramah anak di Pendidikan Darurat di pengungsian Desa Deyangan.

Tabel 2. Implementasi Prinsip Pengembangan Ramah Anak pada Pendidikan Darurat di Desa Deyangan

| Prinsip Pengembangan Ramah Anak | Implementasi yang dilakukan di pengungsian |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nondiskriminasi | <ul style="list-style-type: none"> • Semua anak yang ada di pengungsian memiliki hak yang sama untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan. Baik itu laki-laki maupun perempuan. • Penyelenggaraan pendidikan disesuaikan dengan kondisi obyektif anak. • Posko menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk siswa PAUD, SD, SMP |
| Kegiatan berorientasikan pada pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pendidikan merupakan hasil kesepakatan yang disusun secara tentatif melalui rencana kontinjensi yang disusun tahun 2017 dan diperbaharui tahun 2019 antara Desa Krinjing selaku Desa KRB III dan Desa Deyangan selaku Desa Penyangga • Materi yang ada dalam rencana kontinjensi meliputi lokasi, fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran dan penanggungjawab pelaksana kegiatan • Implementasi pendidikan darurat dilakukan oleh 3 komponen yaitu 1) Sekolah Darurat Merapi, 2) Taman Pendidikan Al Quran (TPA), 3) OPRB Desa Krinjing dan LPBDes Deyangan |
| Menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak | <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kebutuhan makanan yang sehat • Setiap anak diberikan hak dan akses untuk mendiskusikan apabila ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi di pengungsian kepada ketiga komponen yang menanganinya. Hak ini dapat mereka peroleh setiap saat, boleh dengan relawan yang dikehendakinya • Aturan-aturan yang berlaku disosialisasikan dan didiskusikan kepada anak-anak dan orangtua yang mendampingi |
| Penghormatan terhadap pandangan anak | <ul style="list-style-type: none"> • Metode pembelajarannya dilakukan dengan: demonstrasi, tanya jawab, simulasi, diskusi. • Teknik pembelajarannya bersifat spesifik dan unik, karena pembelajarannya selalu mempertimbangkan partisipasi aktif anak dan kondisi psikologis dengan harapan anak mengikuti pembelajaran tidak dengan merasa tertekan. • Relawan berperan sebagai pendamping belajar |
| Pengelolaan pendidikan yang baik | <ul style="list-style-type: none"> • Posko memiliki data induk anak. • Informasi kegiatan pendidikan terjadwal perminggu, dan diperbaharui secara periodik. • Materi pelajaran umum diberikan oleh Relawan Sekolah Darurat Merapi, diselenggarakan seminggu 5 kali, setiap pertemuan berlangsung 2 jam dari jam 08.00-10.00. • Materi pendidikan agama diberikan oleh Relawan TPA, diselenggarakan seminggu 3 kali. Berlangsung 2 jam dari jam 14.00 – 15.00 • Materi pokok yang diberikan OPRB/ LPBDes: olahraga, kemandirian, kebersihan lingkungan, berdamai dengan diri dan permainan tradisional |

Sumber data: hasil FGD dengan Relawan, wawancara dengan anak-anak, observasi

Dari data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, dapat diperoleh pengetahuan bahwa Pendidikan Darurat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Krinjing dan Desa Deyangan sudah berbasis ramah anak. Implementasi system sister village, menjadikan 10 sektor penting dalam mitigasi bencana menjadikan proses pengungsian lebih terorganisir, terencana, dan humanis.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian adalah pendidikan darurat yang diselenggarakan dalam implementasi sistem *sister village* telah melaksanakan prinsip-prinsip ramah anak yaitu nondiskriminasi, kegiatan berorientasikan pada pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistic dan terintegrasi setiap anak, penghormatan terhadap pandangan anak, pengelolaan pendidikan yang baik. Pendidikan darurat telah memberikan rasa aman nyaman pada anak, jauh dari kekerasan dan eksploitasi serta melindungi anak dari perilaku yang salah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa KRB III dan Desa Penyangga beserta anggotanya, para relawan luar biasa. Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan kesempatan dan pendanaan untuk dapat mengikuti The15th Urecol 2022 di Universitas Muhammadiyah Gombong.

References

- [1] S. Wiguna *et al.*, "Indeks Risiko Bencana Indonesia 2020," Jakarta, 2020.
- [2] Kemendikbud, "Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dalam Situasi Darurat," Jakarta, 2018.
- [3] J. Warsihna, E. O. M. Anwas, F. R. Kosasih, and Z. Anas, *Berdamai dengan Bencana Melalui Pendidikan: Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dalam Kondisi Darurat Bencana*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2020.
- [4] E. T. W. Mei, A. Fajarwati, J. Sudibyo, I. M. Sari, and D. Safitri, *Sister Village: Strategi Alternatif Mitigasi Bencana Gunungapi*. Yogyakarta: UGM Press, 2018.
- [5] K. P. Sari, P. Priyo, A. Oktradiksa, and A. Setiawan, "Sistem Informasi Desa Dalam Mitigasi Bencana (Peran Desa Penyangga Dalam Implementasi Sister Village)," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEDITEG*, vol. 3, no. 1, pp. 1–8, 2018, doi: 10.34128/mediteg.v3i1.27.
- [6] I. B. Adi, H. H. Wantoro, and A. B. Prasetyo, *Penyusunan Rekontijensi*. Jakarta: BNPB, 2020.
- [7] B. Hayudityas, "Pentingnya Penerapan Pendidikan Mitigasi Bencana Di Sekolah Untuk Mengetahui Kesiapsiagaan Peserta Didik," *Edukasi Non Formal*, vol. 1, no. 2, pp. 94–102, 2020.
- [8] S. Andreastuti, A. Budianto, and E. T. Paripurno, *Integrating Social and Physical Perspectives of Mitigation Policy and Practice in Indonesia*. Switzerland: Springer, Cham, 2017.
- [9] M. U. Absor, "Penanganan Anak dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Alam: Tinjauan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak," *Jurnal Dakwah*, vol. XII, no. 1, pp. 17–32, 2011.
- [10] A. Hilman, "Integrasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam Kegiatan Pendidikan di Sekolah," 2015.
- [11] D. Triana, T. S. Hadi, and M. K. Husain, "Mitigasi Bencana Melalui Pendekatan Kultural Dan Struktural," 2017.

- [12] D. C. Istiyanto, "Mitigasi Struktural," no. 2, 2007.
- [13] F. Kagawa, "Emergency Education: A Critical Review of The Field," *Comparative Education* 487–503, vol. 41, no. 4, pp. 487–503, 2005, doi: 10.1080/03050060500317620.
- [14] D. Burde, A. Kapit, R. L. Wahl, O. Guven, and M. I. Skarpeteig, "Education in Emergencies: A Review of Theory and Research," *Review of Educational Research*, vol. 87, no. 3, pp. 619–658, 2017, doi: 10.3102/0034654316671594.
- [15] M. B. Miles and A. M. Huberman, *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications. London: SAGE Publications Ltd., 1994.
- [16] F. Rusmayanti, "Identifikasi Potensi Desa Tamanagung untuk Mendukung Konsep Sister Village dalam Konteks Manajemen Bencana," *Jurnal Bumi Indonesia*, vol. 5 No. 3, 2016.
- [17] L. Hidayat, "Pengembangan Buku Kesiapsiagaan Bencana untuk Sekolah Inklusi (Hasil Analisis Sekolah Ramah Anak Di Sleman Yogyakarta)," *Elementary School*, vol. 7, no. 1, pp. 58–68, 2020, doi: <https://doi.org/10.31316/esjurnal.v7i1.480>.
- [18] K. P. Sari, Priyo, A. Oktradiksa, and A. Setiawan, "Ekspo Potensi Budaya Desa Bersaudara sebagai Upaya Peningkatan Modal Sosial dalam Program Sister Village," *Jurnal SOLMA*, vol. 10, no. 1, pp. 70–80, 2021, doi: <https://doi.org/10.22236/solma.v10i1.5201>.
- [19] G. Sudiartha, R. Subiyakto, M. Pardede, S. Kurniandaru, and A. Widiyanto, *Jangan Panik! Praktik Baik Pendidikan Kebencanaan*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, 2019.
- [20] L. N. Rosalin, *Panduan Sekolah Ramah Anak*. Jakarta: Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
